



IPB Today

Volume 206 Tahun 2019

IPB Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila



Pada Sabtu, 1 Juni 2019, Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila. Bertempat di lapangan upacara Gedung Rektorat Kampus IPB Dramaga Bogor, upacara diikuti oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB, Dr. Drajat Martianto selaku Inspektur Upacara membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). "Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa yang digali

oleh para pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Walaupun sebagian bangsa masih belum secara sempurna berhasil merealisasikan nilai-nilai pancasila, kita akui bahwa eksistensi keindonesiaan baik sebagai bangsa maupun sebagai negara masih dapat bertahan hingga kini berkat Pancasila.

Pancasila sebagai suatu keyakinan dan pendirian yang asasi harus terus diperjuangkan. Proses internalisasi sekaligus pengalaman nilai-nilai Pancasila harus tertanam

Penanggung Jawab: Yatri Indah Kusumastuti **Pimpinan Redaksi:** Siti Nuryati **Redaktur Pelaksana:** Aris Solikhah
Editor : Siti Zulaedah, Rio Fatahillah CP **Reporter :** Dedeh H, Awaluddin **Fotografer:** Cecep AW, Bambang A
Layout : Dimas R **Alamat Redaksi:** Biro Komunikasi IPB Gd. Andi Hakim Nasoetion, Rektorat Lt. 1, Kampus IPB Dramaga
Telp. : (0251) 8425635, **Email:** humas@apps.ipb.ac.id



@ipbofficial



@ipbofficial



@institutpertanianbogor

LINE@ @ipb.ac.id



www.ipb.ac.id

dalam hati yang suci dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah. Berkat Pancasila sebagai bintang penuntun, keberagaman yang ada dapat dirajut menjadi identitas nasional dalam wadah dan slogan Bhinneka Tunggal Ika.

Dr. Drajat lebih lanjut mengurai, dalam konteks itulah merayakan hari kelahiran Pancasila harus dibangun kebersamaan dan harapan untuk menyongsong kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Pancasila sebagai leitstars dinamis, bintang penuntun mengandung visi dan misi negara yang memberikan orientasi, arah perjuangan dan pembangunan bangsa ke depan. Sebagai energi positif bangsa, Pancasila terus memberikan harapan untuk masa depan, khususnya dalam merealisasikan visi dan misi bangsa Indonesia.

"Sebagai negara bangsa yang inklusif diperlukan pengelolaan unit kultural dan unit politik secara dialektis. Maksudnya keberagaman yang ada secara alami dan kultural harus dikelola dan dikembangkan untuk membangun Tamansari Kebudayaan yang memungkinkan semua makhluk hidup tumbuh sesuai dengan ekosistem yang sehat. Indonesia untuk kita semua dan Pancasila adalah rumah kita semua," urainya.

Untuk itu diperlukan kesadaran dan pemahaman untuk saling menghormati, saling bekerjasama, bergotong royong dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kondisi demikian dapat berkembang melalui budaya politik kewargaan yang demokratis. Budaya politik yang menimbulkan ketakutan. Kita Indonesia, kita Pancasila adalah sosok yang percaya diri, optimis dan penuh harapan dalam menatap masa dengan sebagai bangsa yang maju, adil dan makmur.

Maka melalui peringatan hari kelahiran Pancasila 1 Juni 2019, Pancasila perlu dijadikan sebagai sumber inspirasi

politik harapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita semua harus terus menerus secara konsisten merealisasikan Pancasila sebagai dasar negara, Ideologi negara dan pandangan dunia yang dapat membawa kemajuan dan kebahagiaan seluruh bangsa Indonesia. Kita bersatu membangun bangsa untuk merealisasikan tatanan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Kita Indonesia, Kita pancasila. **(Awl)**



Himpunan Alumni IPB Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan RI dan BEM KM IPB Berangkatkan 503 Mahasiswa untuk Mudik Gratis



Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor (IPB) kerjasama dengan Kementerian Perhubungan RI dan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB berangkatkan 503 mahasiswa untuk Mudik Bareng pada hari jum'at 31 Mei 2019 di Kampus IPB Baranangsiang.

Penglepasan keberangkatan Mudik Gratis dilakukan oleh Direktur Angkutan Multimoda Transportasi, Ahmad Yani, Wakil Rektor bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB, Prof, Dodik Ridho Nurrochmat, Wakil Ketua Umum HA IPB, Nelly Oswini Subekti, Sekretaris Jenderal (Sekjen) HA IPB, Walneg S. Jas dan Presiden BEM KM IPB, Muhammad Nurdiyansyah.

Sekjen HA IPB, Walneg S, dalam sambutannya menyampaikan program mudik gratis mahasiswa IPB ini dirancang termasuk program unggulan Himpunan Alumni IPB. Alhamdulillah tahun ini menjadil lebih banyak. Tahun depan rencananya ingin memberangkatkan minimal untuk 1000 orang.

"Kepada mahasiswa yang mengikuti Mudik Gratis ini, kami harap dapat mengingat hingga menjadi alumni dan bisa meneruskan semangat ini, untuk terus membantu kampus IPB. Lebih lanjut ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah men-support Mudik Gratis ini. Himpunan Alumni IPB tidak hanya mengantarkan peserta Mudik Bareng ke daerah masing-masing namun juga menyediakan paket bingkisan untuk orang tua di rumah yang semua dihimpun dari para sponsor. Selamat Mudik Gratis, selamat bergabung dengan puluhan ribu orang di Monas, semoga Idul fitri membawa berkah," urai Walneg.

Sementara itu Wakil Rektor IPB Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, Prof, Dodik Ridho Nurrochmat menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan dan Himpunan Alumni IPB yang telah memfasilitasi mahasiswa IPB dengan 12 angkutan bis untuk bisa mudik bareng gratis.

Mudik gratis kali ini tidak hanya asyik, aman dan nyaman, moment waktunya pun sangat pas saat ujian sudah selesai, sehingga mudik betul-betul sudah tenang. Prof. Dodik menambahkan semoga tahun depan mudik bareng bisa memfasilitasi lebih banyak lagi, bisa juga untuk tenaga kependidikan dan keluarga.

Direktur Angkutan Multimoda Transportasi, Kementerian Perhubungan RI, Ahmad Yani menyampaikan mudik bareng ini merupakan program pemerintah. Tahun ini menyediakan 1253 kendaraan bis, salah satunya di IPB.

Ketua Panitia Ir. Methia Metriva, alumni Angkatan 27 IPB mengatakan, acara Mudik Bareng Asyik Lancar ini merupakan rangkaian acara bulan ramadhan tahun ini. "Sebelumnya kami telah menyelenggarakan santunan anak yatim dan dhuafa. Acara Mudik bareng Asyik lancar kali ini diikuti oleh 503 peserta mahasiswa IPB dari berbagai angkatan, dengan tujuan mudik bareng ke berbagai provinsi seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Presiden Mahasiswa BEM KM IPB, Muhammad Nurdiyansyah, mengabarkan bahwa hasil komunikasinya dengan sesama BEM se Indonesia, IPB lah yang memberangkatkan mudik bareng dengan peserta mudik terbanyak. **(dh)**



FGD Faperta IPB: Tenurial Lahan Perkebunan dan Perhutanan



Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) “Tenurial Lahan Perkebunan dan Perhutanan” di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Selasa (28/5). FGD ini digelar karena melihat banyaknya konflik lahan di kawasan perkebunan dan kawasan hutan akibat saling klaim kepemilikan lahan dan kurang serasinya dengan peraturan perundangan.

Menurut Dekan Fakultas Pertanian IPB, Dr. Suwardi, isu tersebut mencuat dalam debat Calon Presiden beberapa waktu lalu. Kepemilikan lahan Calon Presiden (Capres) 02 disebut sangat luas di Aceh dan Kalimantan Timur. Disebut Capres 02 bersedia mengembalikan kepada negara apabila negara membutuhkan lahan. “Hal ini mengundang banyak pertanyaan, jika kepemilikan lahan tersebut sesuai peraturan perundangan mengapa perlu menyatakan akan mengembalikan kepada negara. Situasi lainnya, adanya usulan untuk membuka semua HGU (Hak Guna Usaha) yang dimiliki oleh para pengusaha perkebunan,” papar Dr. Suwardi.

Dalam FGD kali ini dikupas tuntas mengenai hak pemilik HGU tersebut dan apakah pemilik HGU berhak membeberkan seluruh informasi yang terkandung di dalamnya.

Kegiatan yang dimoderatori Prof. Dr. Budi Mulyanto, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB ini dihadiri narasumber Ery Suwondo, SH selaku Sekretaris Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Prof. Dr. Ir Yanto Santosa (Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB), Ir. Joko Supriyono (Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia/GAPKI), dan Dr. Sadino (Pakar dan Praktisi Hukum Lingkungan).

Ery Suwondo, SH dari Kementerian ATR/BPN menjelaskan bahwa ada beberapa jenis pemberian hak dan ijin penggunaan lahan. “Menurut UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, HGU dapat diberikan dalam jangka waktu 25 tahun dan untuk tujuan tertentu dapat diberikan maksimal 35 tahun. Pemegang HGU dapat memindahtangankan

kepada pihak lain. Sementara itu ada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dapat diberikan lebih lama dari HGU kepada badan usaha negara, swasta, dan koperasi. Bedanya dengan HGU, hak perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Lahan yang dimiliki Capres 02 di Aceh dan Kalimantan adalah IUPHHK-HTI bukan HGU," papar Ery.

Menurut Prof. Dr. Yanto Santosa dari Fakultas Kehutanan IPB, adanya konflik lahan yang banyak terjadi saat ini karena pemegang HGU atau IUPHHK-HTI harus berjuang sendiri menyelesaikan areal lahan yang masih overlapping dengan masyarakat adat dan penduduk di sekitar hutan. "Pemerintah mestinya yang menyelesaikan ijin dan permasalahan lahan serta analisis dampak lingkungan, kemudian setelah clear and clean baru ditawarkan kepada badan usaha negara, swasta, dan koperasi untuk mengelolanya," tegasnya.

Prof. Yanto menambahkan bahwa Kawasan Hutan Indonesia adalah 125,9 juta hektar sementara kawasan non hutan yang digunakan untuk berbagai aktivitas seperti pertanian, permukiman, industri, dan lain-lain hanya 54,6 juta hektar. "Penyelesaian konflik lahan dapat dilakukan dengan melakukan review Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) permasalahan-permasalahan terkait dengan keruangan dengan mengacu pada keseimbangan ekosistem. Penyelesaian tumpang tindih penggunaan ruang harus berjalan pada rel perundang-undangan. Selanjutnya mendorong optimalisasi penggunaan kawasan hutan yang sudah dilepaskan untuk kepentingan di luar sektor kehutanan, karena masih banyak tanah-tanah terlantar pasca diubah peruntukannya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Disamping itu perlu melakukan koordinasi terkait penerbitan perijinan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat," jelasnya.

Dr. Sadino, praktisi hukum lingkungan menyatakan sumber konflik pertanahan diantaranya akibat definisi hutan dan kawasan hutan. Pada dasarnya sesuai UUD 45, tanah, air dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat. Jika ada tanah yang ditumbuhi hutan, maka hutan tersebut harus memberikan kemakmuran kepada rakyat. "Kalau ada hutan tidak banyak memberikan kemakmuran rakyat maka hal itu perlu dievaluasi penggunaan lahannya, sekarang banyak tanah yang tidak ditumbuhi hutan tetapi masuk kawasan hutan," tutur Dr. Sadino.

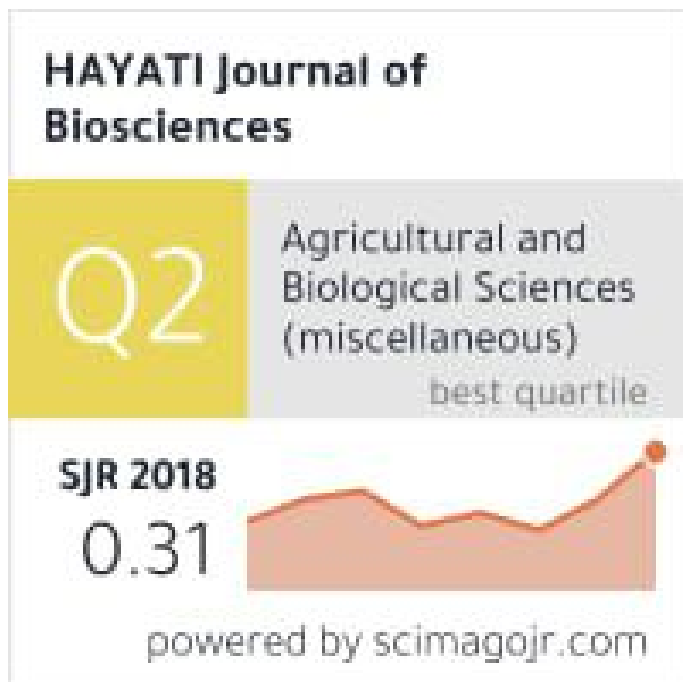
Menurut Dr. Sadino, penetapan kawasan hutan kurang adil karena dilakukan sepihak oleh Kementerian KLHK. Hal ini merupakan salah satu sumber konflik lahan. Oleh karena itu semua pemangku kepentingan lahan harus menggunakan hanya satu istilah saja yakni hutan (tanah yang ditumbuhi hutan) atau kawasan hutan (melalui penetapan) agar berbagai konflik dapat diselesaikan.

Ir. Joko Supriyono, menjelaskan untuk perkebunan sawit yang sebagian diusahakan pada lahan HGU masih banyak terjadi konflik lahan, dan masih banyak para pengusaha sawit yang dirugikan. Meskipun UU Kehutanan No 41 tahun 1999 berjalan, tetapi konflik lahan masih terus berlanjut. Ia mengusulkan perlunya revisi UU Kehutanan agar ada harmonisasi peraturan untuk mengurangi konflik lahan.

Terkait data HGU yang semestinya dibuka untuk publik, Guru Besar Faperta IPB yang bertindak sebagai moderator, Prof Dr Budi Mulyanto mengatakan tidak semua data HGU bisa dibuka ke publik. Karena ada kepentingan privat di dalamnya yang secara hukum dilindungi oleh undang-undang. Menurutnya, data-data umum mengenai luasan dan izin HGU yang telah diberikan bisa saja menjadi data publik, namun tidak etis dan tidak ada perlunya publik mengetahui data privat seperti titik koordinat HGU perusahaan.

Prof. Memen Surahman, staf pengajar Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB yang turut hadir, menyarankan agar berbagai pendapat yang telah disampaikan tersebut di atas dituangkan dalam Policy Brief sehingga dapat diusulkan kepada pemerintah agar ditindaklanjuti. **(rido/ris)**

HAYATI IPB, Pertama dan Satu-satunya Life Science Journal di Indonesia yang Masuk Q2 SJR



HAYATI Journal of Biosciences (HAYATI J Biosci) yang dikelola oleh Perhimpunan Biologi Indonesia, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor (FMIPA IPB) berhasil menjadi yang pertama dan satu-satunya jurnal ilmiah nasional yang masuk dalam kategori kuartil 2 (Q2) dalam Scimago Journal Country and Rank (SJR) untuk bidang Agricultural and Biological Sciences.

Hal ini dilansir di laman scimagojr.com. SJR adalah portal yang mencakup jurnal-jurnal dan indikator ilmiah negara yang dikembangkan dari informasi yang terkandung dalam database Scopus (Elsevier B.V.). Indikator yang digunakan SJR dapat digunakan untuk menilai dan menganalisis bidang ilmiah. Indikator ini menunjukkan visibilitas dari jurnal-jurnal yang terdapat dalam database Scopus dari tahun 1996. H-Index Jurnal Hayati dalam Scopus saat ini adalah 11, dengan nilai SJR yang meningkat dari sebelumnya 0.196 menjadi 0.31 dan jumlah sitasinya meningkat dua kali lipat.

Sejak terbit tahun 1994, HAYATI J Biosci menjadi salah satu jurnal ilmiah nasional yang selalu terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Pada tahun 2007, HAYATI J Biosci

dengan program internasionalisasinya melakukan penerbitan online dengan menggunakan Open Journal System (OJS) di laman

<http://journal.ipb.ac.id/index.php/hayati>.

Sejak 5 Agustus 2015 laman jurnal ilmiah HAYATI J Biosci resmi online di laman Elsevier menjadi jurnal pertama dan satu-satunya yang diterbitkan secara online oleh penerbit terkemuka Elsevier. Jurnal IPB ini telah dicantumkan di halaman Elsevier.com dan portal artikel ilmiah Science Direct milik Elsevier (<http://www.journals.elsevier.com/hayati-journal-of-biosciences>).

Berkat kerjasama ini, pengelola, penelaah, penulis, dan pembaca HAYATI J Biosci dapat menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan oleh Elsevier seperti portal artikel ilmiah Science Direct, sistem pengelolaan naskah online EES/EVISE, keanggotaan di Committee on Publication Ethics (COPE). Kemudian, penggunaan piranti lunak anti plagiarisme iThenticate, pengarsipan jangka panjang di berbagai lembaga arsip internasional, dan optimalisasi pada mesin pencari Google.

Sampai saat ini HAYATI J Biosci telah terindeks dalam SCOPUS, ASEAN Citation Index, DOAJ, SINTA, National Library of Medicine Catalog, Crossref, ROAD, CABI, EBSCO, Publons, Scilit, Agricola, ProQuest dan sebagainya.

(YDI/ris)

Akses berita dan foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id